

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angkutan penumpang umum adalah angkutan penumpang melalui sistem berbayar atau sewa. Yang dimaksud dengan angkutan umum penumpang meliputi angkutan perkotaan (bus, minibus, van, dll), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara (Warpani, 1990). Dengan adanya pelayanan angkutan umum yang memadai, maka masyarakat dapat dengan mudah berpindah atau menjangkau suatu tujuan tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu angkutan umum memegang peranan penting untuk menunjang aksesibilitas masyarakat dalam melakukan perjalanannya. Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Disamping itu, pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas dan pergerakan masyarakat sehingga membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan adalah dengan mempromosikan angkutan umum yang bisa mengambil alih sebagian perjalanan-perjalanan yang dilakukan dengan kendaraan pribadi (Fierek & Zak, 2012). Hal tersebut menjadi sebuah tantangan mengingat kelebihan yang dimiliki oleh kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum seperti perjalanan "*door to door*". Hal itu menjadikan kebutuhan angkutan massal sebagai salah satu moda yang berpotensi melayani kemudahan dalam berpindah akan semakin meningkat.

Kabupaten Grobogan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.507.156 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 744,701 Jiwa/ Km² (Tim PKL Kabupaten Grobogan, 2023) dan jumlah pergerakan masyarakat yaitu sebanyak 2.924.372 perjalanan per harinya. Dilihat dari jumlah pergerakan masyarakatnya, Kabupaten Grobogan memiliki arus lalu lintas dan mobilitas

masyarakat yang tinggi ditambah dengan hasil analisis Tim PKL Kabupaten Grobogan 2023, dimana tingkat penggunaan kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Grobogan cukup tinggi yaitu sebesar 70% untuk sepeda motor, 13% untuk mobil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan membutuhkan suatu sistem angkutan umum yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan salah satu solusi agar masyarakat dapat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum serta dapat mengurangi kemacetan dengan menyediakan sarana angkutan massal berupa BRT Trans Jateng. BRT Trans Jateng memiliki salah satu koridor yaitu koridor 6 yang melayani dari Terminal Penggaron (Semarang) – Terminal Gubug (Grobogan) dengan Panjang Trayek 34,2 Km (Tim PKL Kabupaten Grobogan, 2023). Peluncuran BRT Trans Jateng ini mendapat respon positif dari masyarakat Kabupaten Grobogan karena adanya fasilitas transportasi umum yang memberikan kenyamanan serta keamanan dengan tujuan yang sampai ke Kabupaten Semarang. Berdasarkan laporan operasional Bus Trans Jateng Tahun 2023 pada bulan Oktober didapatkan load factor dari BRT Trans Jateng ini telah mencapai 82,61% hal ini menandakan minat masyarakat tinggi dalam menggunakan BRT ini karena sesuai SK DIRJEN 687 Tahun 2002 untuk minimal kinerja pelayanan angkutan umum adalah 70%. Namun, menurut hasil survei wawancara penumpang sebagian besar penumpang yang menuju pelayanan BRT Trans Jateng masih menggunakan kendaraan pribadi dengan persentase sebesar 43% untuk moda sebelum dan 46% untuk moda sesudah (Tim PKL Kabupaten Grobogan, 2023), terlebih lagi di Kabupaten Grobogan belum seluruh zona terlayani angkutan umum yang salah satunya wilayah pemukiman yang berdekatan dengan pelayanan BRT Trans Jateng sehingga masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menjangkau pelayanan BRT Trans Jateng tersebut.

Dari permasalahan yang telah disebutkan diatas menjadi latar belakang dari terciptanya integrasi antar moda. Kemudian untuk mewujudkan integrasi tersebut menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia PM No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Pasal 53 ayat 3 disebutkan angkutan massal berbasis jalan salah satunya harus didukung dengan angkutan pengumpan. Kemudian pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 pasal 57 ayat 1 disebutkan pengembangan angkutan umum meliputi pengembangan trayek angkutan umum ke seluruh pusat-pusat pelayanan. Dimana angkutan pengumpan ini akan memudahkan masyarakat yang akan menuju halte untuk naik BRT Trans Jateng dan masyarakat yang turun dari BRT Trans Jateng menuju tempat tujuan selanjutnya. Dengan adanya sistem integrasi transportasi umum tersebut akan memberikan perjalanan yang *seamless*, sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju tempat tujuan.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Perencanaan Angkutan Perkotaan Sebagai *Feeder* Untuk BRT Trans Jateng Koridor 6 Di Kabupaten Grobogan”**. Kajian ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah menjangkau pelayanan BRT Trans Jateng.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingginya pengguna kendaraan pribadi untuk menuju BRT Trans Jateng Koridor 6 dengan persentase sebesar 43% untuk moda sebelum dan 46% untuk moda sesudah serta tingkat penggunaan sepeda motor masyarakat Kabupaten Grobogan yang tinggi yaitu sebesar 70%;
2. Terdapat daerah yang belum terlayani angkutan perkotaan dan pedesaan;

3. Belum tersedianya angkutan *feeder* untuk BRT Trans Jateng Koridor 6.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam perencanaan angkutan pengumpan untuk BRT Trans Jateng Koridor 6 sebagai berikut :

1. Berapa jumlah permintaan masyarakat pada wilayah kajian terhadap pelayanan angkutan pengumpan BRT Trans Jateng Koridor 6?
2. Bagaimana rute yang direncanakan untuk angkutan pengumpan BRT Trans Jateng Koridor 6 dan apa jenis kendaraan?
3. Bagaimana rencana kinerja operasional dari angkutan pengumpan (*feeder*)?
4. Berapa biaya operasional serta tarif yang sesuai dengan pelayanan angkutan pengumpan tersebut jika nantinya akan beroperasi?

1.4 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan pengumpan untuk BRT Trans Jateng Koridor 6.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa jumlah permintaan terhadap pelayanan angkutan pengumpan;
2. Mengusulkan rute untuk angkutan pengumpan (*feeder*);
3. Menganalisa kinerja operasional angkutan pengumpan;
4. Menghitung biaya operasional kendaraan (BOK) serta tarif angkutan pengumpan.

1.5 Ruang Lingkup

Agar menjadikan pembahasan penelitian lebih terfokus dan menghindari pembahasan diluar dari tujuan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Masalah yang dikaji adalah adanya perencanaan angkutan *feeder* untuk BRT Trans Jateng Koridor 6;
2. Lokasi studi yang diambil adalah di Kabupaten Grobogan tepatnya Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug,

Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Kedungjati;

3. Dalam penelitian perencanaan angkutan *feeder* yang dianalisis berupa jumlah permintaan, rute dan menentukan jenis kendaraan, kinerja operasional rencana dan biaya operasional kendaraan (BOK) serta tarif angkutan *feeder*.